

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai prediksi kondisi *financial distress* juga telah dilakukan oleh Damayanti, *et al* (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Komite Audit Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Prediksi Financial Distress”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 42 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2015, sehingga diperoleh 210 data laporan keuangan tahunan. Teknik pengambilan sampel ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi financial distress. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi financial distress. Ukuran komite audit tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi financial distress. Sedangkan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi financial distress.

Sulistyowati, *et al* (2019) telah melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh *Corporate Governance* dan *Financial Indikator* terhadap kondisi *Financial Distress*. Adapun variabel independen yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah dewan audit, likuiditas, leverage, dan profitabilitas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dan yang terpilih adalah sebanyak 24 perusahaan. Metode analisis data yang digunakannya adalah regresi logistik). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi, likuiditas, dan profitabilitas positif untuk kondisi *financial distress*. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional tidak mempengaruhi kondisi *financial distress*. Jumlah dewan audit dan leverage tidak berhubungan dengan kondisi *financial distress*.

Febriyan dan Prasetyo (2019) dalam penelitiannya menguji tentang seberapa besar pengaruh arus kas operasi, likuiditas, leverage, diversifikasi dan ukuran perusahaan terhadap financial distress. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 22 perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2014-2016 sehingga total sampel adalah 66 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah uji regresi logistik. Hasil pada penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh arus kas operasi, likuiditas, diversifikasi dan ukuran perusahaan terhadap financial distress. Sedangkan leverage berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Irwandi dan Rahayu (2019) telah melakukan pengujian tentang pengaruhnya inflasi, likuiditas dan leverage terhadap *financial distress* di sektor perusahaan pertaniaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan terpilih 15 perusahaan dengan periode penelitian 2014 – 2018. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 25. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bahwa secara simultan inflasi, likuiditas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sedangkan secara parsial, inflasi dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress, sedangkan leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress.

Penelitian yang dilakukan oleh Masak dan Noviyanti (2019), mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap financial distress. Perusahaan yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh empat karakteristik komite audit yang terdiri atas ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan jumlah ahli keuangan komite audit pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode tahun 2017. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 45 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap *financial distress* sedangkan independensi komite

audit, frekuensi pertemuan komite audit dan jumlah ahli keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Penelitian Ramadhani dan Khairunnisa (2019) meneliti tentang pengaruh *operating capacity*, *sales growth*, dan arus kas operasi terhadap *financial distress*. Penelitian ini menggunakan 8 perusahaan di sektor pertanian yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2017, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 40 data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *operating capacity*, *sales growth* tidak berpengaruh terhadap terjadinya *financial distress*, sedangkan arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya *financial distress*.

Menurut Sari, *et al* (2019) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress*. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi pengaruh faktor rasio keuangan yang terdiri atas rasio likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap kondisi *financial distress*. Adapun sampel yang digunakannya adalah 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2016-2018. Metode analisis data yang digunakannya adalah regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio likuiditas, leverage, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Waqas dan Md-Rus (2018) telah melakukan penelitian di Pakistan dengan judul "*Predicting financial distress: Importance of accounting and firm-specific market variables for Pakistan's listed firms*". Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor keuangan yang terdiri atas rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, dan arus kas serta dua faktor pasar yaitu ukuran dan standar deviasi idioinkrtik yang mempengaruhi *financial distress* di perusahaan non keuangan di Pakistan. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 290 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Pakistan selama periode 2007-2016. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, dan arus kas mempengaruhi kondisi *financial distress* sedangkan *market variabel* tidak mempengaruhi kondisi *financial distress*.

Penelitian dengan judul “*The Determinant of Financial Distress in Indian Real Estate and Construction Industry*” yang diteliti oleh Mittal dan Lavina (2018) di India. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor terjadinya *financial distress* dengan menggunakan indikator *financial ratios* yang terdiri atas likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 42 perusahaan *real estate* dan konstruksi yang terdaftar di *Bombay Stock Exchange* (BSE) selama periode tahun 2005-2016. Metode analisis data yang digunakannya adalah probabilitas linear. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini berarti bahwa untuk menghindari kondisi *financial distress* perusahaan *real estate* dan konstruksi harus meningkatkan laba atas ekuitas (ROE).

Menurut Norziation dan Hafizah (2019) dalam penelitiannya di Malaysia yang berjudul “*Audit Committee and Financially Distressed Firms in Malaysia*”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 perusahaan yang *disuspend* dari Bursa Malaysia. Total data sampel yang terkumpul sebanyak 126 data laporan keuangan selama periode 2009-2017. Adapun variabel independen yang digunakannya adalah keahlian komite audit, independensi komite audit, ukuran komite audit, ketekunan komite audit dan banyaknya jabatan direktur. Metode analisis yang digunakannya adalah regresi linear berganda. Variabel independen yang digunakan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar karakteristik komite audit pengaruhnya terhadap *financial distress*. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit, independensi komite audit, ketekunan komite audit dan jumlah direktur komite audit berpengaruh dan signifikan terhadap *financial distress*. Sedangkan ukuran komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan suatu bentuk hubungan kontraktual antara *principal* dengan *agent* untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pembuatan keputusan. *Principal* adalah pemegang saham atau investor dan *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan (Sulistyowati, *et al* 2019:22).

Teori keagenan digunakan oleh penulis karena teori ini berkaitan dengan penelitian ini, yaitu komite audit yang merupakan bagian dari pemilik yang bertugas membantu dalam pengawasan kinerja pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Pengawasan dilakukan agar tidak adanya manipulasi informasi yang dilakukan oleh manajemen kepada pemilik baik berupa informasi keuangan dan informasi yang bukan keuangan. Selain itu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan misalnya rasio profitabilitas dan rasio arus kas operasi. Rasio profitabilitas yang rendah pada perusahaan akan memicu perusahaan terjebak dalam kondisi *financial distress*. Arus kas operasi perusahaan yang lancar dapat menjadi keyakinan kepada pemilik (*principal*) atas hasil kerja dari manajemen (*agent*). Di sisi lain, tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak kepada informasi keuangan yang dihasilkan. Apabila informasi keuangan buruk maka akan menjadikan perusahaan dalam keadaan *financial distress* dan akan memberikan kabar buruk bagi investor yang ingin menanamkan modalnya.

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengendalian perusahaan semakin terpisah dari kepemilikan. Manajer bertanggung jawab terhadap pemilik yang kemudian berimbas dengan pendanaan perusahaan baik dari investor atau kreditor. Tujuan dari sistem pemisahan ini adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan memperkerjakan agen-agen profesional dalam mengelola perusahaan. Pihak *agent* mempunyai akses informasi lebih mengenai kondisi perusahaan sehingga *agent* dituntut untuk selalu transparan dalam melaksanakan kendali perusahaan di bawah *principal*. Salah satu bentuk pertanggung jawabannya adalah dengan mengajukan laporan keuangan yang memuat tentang kondisi keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu.

Informasi dari laporan keuangan tersebut dapat dijadikan oleh pihak eksternal dalam menilai kondisi perusahaan. Jika arus kas yang diperoleh perusahaan nilainya tinggi dalam jangka waktu relatif lama, maka perusahaan dinilai mampu dalam melakukan pengembalian atas kredit yang diberikan oleh pihak kreditor. Sehingga, perusahaan mendapatkan kepercayaan dan memudahkan dalam mendapatkan kredit disetiap kegiatan operasinya.

Sebaliknya, jika nilai arus kas perusahaan bernilai kecil dalam jangka waktu yang relatif lama, maka pihak eksternal akan berasumsi bahwa perusahaan tidak mampu dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan baik. Kondisi tersebut akan mengakibatkan perusahaan mengalami permasalahan keuangan atau *financial distress*. Hal ini menjadikan pihak eksternal tidak mempercayakan dananya untuk dikelola dalam kegiatan perusahaan tersebut.

Tidak adanya prosedur pengawasan yang efektif maka akan menimbulkan *agency problem* dimana pihak *agent* (manajer) mencoba untuk menyembunyikan, menyamarkan, dan memanipulasi informasi yang diberikan kepada *principal*. Sehingga manajemen terus-menerus memberikan keterangan palsu pada pemegang saham (*principal*) yang akhirnya dapat memunculkan masalah pada perusahaan seperti *financial distress*. Oleh karena itu, keberadaan komite audit sangat berperan dalam menyelesaikan konflik antara *principal* dan *agent* serta untuk menjaga kinerja yang lebih baik.

Kondisi *financial distress* mencerminkan bahwa perusahaan tidak mampu dalam membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Selain itu, laju arus kas dan tidak adanya pengawasan internal sangat berhubungan dengan kondisi *financial distress*. Didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para *principal*. Hal ini berkaitan dengan bagaimana *principal* merasa aman dan yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan kepada mereka. Sebaliknya, apabila laporan keuangan buruk dan menunjukkan kondisi *financial distress* maka akan menciptakan keraguan atas dana yang diberikannya karena tidak adanya kepastian atas *return* dana yang telah diberikan.

2.2.2. *Financial Distress*

2.2.2.1. Pengertian *Financial Distress*

Financial distress atau sering disebut dengan kesulitan keuangan adalah suatu kondisi dimana perusahaan tidak mampu menunaikan kewajiban keuangannya sesuai yang sudah ditetapkan sebelumnya (Surdyanti dan Dinar, 2019:102). Kondisi *financial distress* tergambar dari penurunan laba secara berturut-turut dan menjadi pra kondisi sebelum terjadinya kebangkrutan di perusahaan. (Sudaryanti dan Dinar, 2019:102).

Menurut Plat dan Plat (2002), *financial distress* adalah Tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Sedangkan menurut Febriyan dan Prasetyo (2019:105), *financial distress* adalah kondisi dimana perusahaan berada dalam posisi tidak aman dari ancaman kebangkrutan atau sedang mengalami kesulitan keuangan.

Hapsari (2012) dalam Nukmaningtyas dan Worokinasih (2018:138) menyatakan bahwa *financial distress* adalah suatu kondisi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar perusahaan (seperti utang dagang dan beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan. Menurut Christine (2019:341), *financial distress* terjadi karena ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola dan menjaga kestabilan kinerja keuangan sehingga perusahaan mengalami kerugian operasional, hilangnya kepercayaan dari *shareholder* dan pada akhirnya akan mengalami pailit.

Dari pengertian *financial distress* tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa *financial distress* adalah suatu keadaan dimana perusahaan mengalami penurunan keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi.

2.2.2.2. Jenis-jenis *Financial Distress*

Menurut Gamayuni (2011:165) terdapat lima jenis *financial distress*, antara lain sebagai berikut:

1. *Economic failure*

Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk *cost of caapitalnya*.

2. *Business failure*

Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditur.

3. *Technical insolvency*

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan *Technical insolvency* jika tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar hutang secara teknis menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara, yang jika diberi waktu, perusahaan mungkin dapat membayar hutangnya dan *survive*.

4. *Insolvency in bankruptcy*

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan *Insolvency in bankruptcy* jika nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset. Perusahaan yang dalam keadaan *insolvency in bankruptcy* tidak perlu terlibat dalam tuntutan kebangkrutan secara hukum.

5. *Legal bankruptcy*

Perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang.

2.2.2.3. Penyebab *Financial Distress*

1. Faktor Internal Perusahaan

Menurut Rahmy (2015:5), terdapat 3 faktor internal perusahaan yang menyebabkan *financial distress* dalam perusahaan, yaitu :

a) Kesulitan arus kas

Terjadi ketika penerimaan pendapatan perusahaan dari hasil kegiatan operasi tidak cukup untuk menutupi beban-beban usaha yang timbul dari aktivitas operasi perusahaan. Selain itu, kesulitan arus kas juga bisa disebabkan karena adanya kesalahan manajemen suatu perusahaan dalam mengelola aliran kas perusahaan dimana hal itu dapat menyebabkan kesulitan keuangan.

b) Besarnya jumlah hutang

Kebijakan pengembalian hutang perusahaan untuk menutupi biaya yang timbul akibat operasi perusahaan akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan hutang tersebut di masa yang akan datang. Ketika tagihan telah jatuh tempo, sedangkan perusahaan tidak memiliki cukup untuk melunasi tagihan-tagihan tersebut, maka kemungkinan yang akan dilakukan kreditur adalah melakukan penyitaan harta perusahaan tersebut untuk menutupi kekurangan pembayaran tagihan tersebut.

c) Mengalami kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan sebelum beberapa tahun

Dalam hal ini merupakan kerugian operasional perusahaan yang bisa menimbulkan arus kas negatif dalam perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena beban operasional lebih besar dari pendapatan yang diterima perusahaan.

2. Faktor Eksternal Perusahaan

Nirmalasari (2018:39) terdapat 3 faktor eksternal perusahaan yang menyebabkan *financial distress* dalam perusahaan, yaitu :

a) Faktor pelanggan/konsumen

Perusahaan harus bisa mengidentifikasi sifat konsumen, karena berguna untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang untuk menemukan konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil penjualan dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing.

b) Faktor kreditur

Kekuatannya terletak pada pemberian pinjaman dan mendapatkan jangka waktu pengembalian utang yang tergantung kepercayaan kreditur terhadap kelikuiditasan suatu perusahaan.

c) Faktor Pesaing

Perusahaan jangan melupakan pesaingnya karena jika produk pesaingnya lebih diterima oleh masyarakat perusahaan tersebut akan kehilangan konsumen dan mengurangi pendapatan yang diterima.

3. Faktor Umum

Terdapat beberapa faktor umum yang menyebabkan *financial distress* dalam perusahaan (Nukmaningtyas dan Worokinasih, 2018:139), yaitu :

a) Profitabilitas

Kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tidak efisien dan efektif mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Sehingga laba yang terus menerus turun akan membawa perusahaan kedalam kondisi *financial distress*.

b) Arus Kas Operasi

Arus kas operasi yang terbatas, tidak dapat digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan aktivitas operasinya seperti membayar deviden, melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasinya. Sehingga perusahaan akan sulit dalam menjalankan bisnisnya dan berisiko mengalami *financial distress*

Sedangkan menurut Kurniasanti dan Musdholifah (2019:200), yang menjadi faktor dalam menyebabkan *financial distress* adalah

a) Komite Audit

Komite audit yang tidak efektif disebabkan karena jumlah anggota yang tidak memadai untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Komite audit dengan jumlah anggota yang tepat dapat menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Ukuran komite audit yang kecil berisiko menurunkan kualitas pengendalian internal dan akan membuat perusahaan mengalami *financial distress*.

b) Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum akan menurunkan permintaan konsumen akan suatu barang, dan secara otomatis penjualan perusahaan juga menurun. Inflasi yang terus meningkat mengakibatkan perusahaan merugi karena berkurangnya pendapatan sehingga memicu terjadi *financial distress*

2.2.3. Komite Audit

2.2.3.1. Pengertian Komite Audit

Definisi komite audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Sedangkan menurut Arens (2014:104) mendefinisikan komite audit adalah

“Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen.”

Menurut Ramdani dan Wijaya (2019), komite audit adalah suatu komite yang bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Syarat komite audit minimal memiliki 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang komisaris independen dan minimal 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari perusahaan publik atau luar emiten.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah komite yang berfungsi sebagai pengendalian internal perusahaan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan mengawasi pelaporan keuangan.

2.2.3.2. Keanggotaan Komite Audit

Ketentuan mengenai keanggotaan komite audit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

3. Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

2.2.3.3. Peran dan Tanggungjawab Komite Audit

Komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015, tugas dan tanggungjawab komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

2.2.4. Profitabilitas

2.2.4.1. Pengertian Profitabilitas

Dalam penelitian Farah (2018), Darsono (2009:58) mendefinisikan profitabilitas adalah kemampuan manajemen dalam memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Agar dapat memperoleh laba di atas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan (*revenue*) dan mengurangi semua beban (*expense*) atas pendapatan. Hal ini berarti bahwa

manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah.

Menurut Nirmalasari (2018:30), Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung menggunakan hutang yang relatif lebih kecil Kasmir (2008, dalam kurniasanti dan Musdholifah, 2019:5). Apabila profitabilitas suatu perusahaan terus menurun dan bahkan berjumlah negatif maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress*

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016:1590) mendefinisikan profitabilitas adalah Profitabilitas adalah salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.

Dari pengertian profitabilitas tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan, aset, dan investasi selama periode tertentu.

2.2.4.2. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas menitikberatkan pada kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Kemampuan ini dapat dilihat dari hasil kegiatan operasional perusahaan yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba juga bergantung pada aset yang tersedia untuk kegiatan operasional perusahaan yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Dengan demikian hubungan antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sering kali digunakan dalam mengevaluasi profitabilitas (Warren, 2014:859).

Menurut Murhadi (2015:63) dalam penelitian Christine (2019), rasio profitabilitas merupakan perbandingan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio laba ini umumnya diambil dari laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan bersih, laba kotor, laba bersih, laba sebelum pajak, laba setelah pajak dan laba yang tersedia bagi pemegang saham.

Rasio profitabilitas menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan aset perusahaan. Hal ini dikarenakan rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aset (ROA), Harahap (2011, dalam Nukmaningtyas dan Worokinasih, 2018:137). Dengan adanya, efisiensi dan efektivitas dari penggunaan aset tersebut, maka beban dan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akan lebih kecil, sehingga perusahaan dapat menjalankan usahanya dengan stabil karena memiliki keuangan yang cukup. Dengan itu, laba yang diperoleh perusahaan tersebut merupakan hasil pemanfaatan dari aset perusahaannya, yang kemudian laba tersebut dapat kembali digunakan dalam menjalankan usaha perusahaan di periode berikutnya. Semakin tinggi nilai *Return On Aset* (ROA) maka mencerminkan penggunaan aset yang efisien dan efektif oleh manajemen, sehingga peluang perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress* akan semakin rendah (Farah, 2018:38).

2.2.5.3. Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Nirmalasari (2018:30) analisis utama untuk profitabilitas terdapat enam jenis dalam menilai tingkat profitabilitas, di antaranya sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin*

Rasio *Gross Profit Margin* mengukur perbandingan presentase laba kotor dengan penjualan. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai disetiap rupiah penjualan. Semakin tinggi rasio *Gross Profit Margin* maka semakin tinggi bagian biaya operasional yang bisa tertutupi dan semakin besar estimasi laba bersih yang akan dicapai.

Rumus:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Operating Margin Ratio*

Rasio *Operating Margin Ratio* mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih. Rasio ini mencerminkan laba yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan.

Rumus:

$$\text{Operating Margin Ratio} = \frac{\text{Laba Usaha}}{\text{Penjualan}}$$

3. *Net Margin Ratio*

Rasio *Net Margin Ratio* mengukur perbandingan antara laba yang telah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan.

Rumus:

$$\text{Net Margin Ratio} = \frac{\text{Laba Bersih} - \text{Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

4. *Operating Ratio*

Rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan, sehingga rasio yang tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik karena hal tersebut menyatakan setiap rupiah penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi sehingga menjadi bagian laba akan kecil.

Rumus:

$$\text{Operating Ratio} = \frac{\text{Harga Pokok} + \text{Biaya Operasi}}{\text{Penjualan}}$$

5. *Return On Assets (ROA)*

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dipergunakan dalam perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Rumus:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

6. *Return On Equity (ROE)*

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, artinya rasio ini mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan.

Rumus:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

2.2.5. Arus Kas

2.2.5.1. Pengertian Arus Kas

Kas adalah saldo residual dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar yang terjadi pada periode-periode sebelumnya di perusahaan. (Sumbramanyam, 2014:3-4). Menurut Kieso (2017:419) kas merupakan aset keuangan yang juga merupakan instrument keuangan. Instrument keuangan didefinisikan sebagai kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau kepentingan ekuitas pada entitas lain. Warrens (2015:407) menyatakan bahwa kas terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 2 , arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Menurut Marfu'ah (2016:11) laporan arus kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan pengguna-penggunanya. Para manajer sering menggunakan laporan arus kas untuk mengevaluasi kegiatan operasi yang telah lalu dan dalam membuat perencanaan aktivitas pendanaan dan investasi di masa depan (Warren, 2015:786).

Menurut Febriyan dan Prasteyo (2019:106), arus kas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan yang menentukan apakah operasi akan menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi perusahaan membayar dividen dan melakukan investasi.

Menurut Tutliha dan Rahayu (2019:96) bahwa informasi arus kas merupakan indikator bagi pihak kreditor untuk mengetahui kondisi keuangan. Jika perusahaan memiliki jumlah arus kas yang baik, maka kreditor akan mendapatkan keyakinan bahwa perusahaan mampu melakukan kewajibannya dan perusahaan dapat terhindar dari kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress*.

Dari pengertian arus kas tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa arus kas adalah arus kas masuk dan keluar di dalam perusahaan yang akan digunakan untuk keperluan operasi, investasi dan pendanaan perusahaan.

2.2.5.2. Jenis – Jenis Arus Kas

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 2 arus kas diklasifikasikan menjadi tiga aktivitas, yaitu sebagai berikut:

1. Arus Kas Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang tidak yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa sumber pendanaan dari luar. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa
- b. Penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi, dan pendapatan lain
- c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa
- d. Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan
- e. Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lain
- f. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara spesifik aktivitas pendanaan dan investasi
- g. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan

2. Arus Kas Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas investasi ini mempresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diintensikan untuk memperoleh penghasilan dan arus kas masa depan. Namun, hanya pengeluaran yang menghasilkan pengakuan atas aset dalam laporan posisi keuangan yang memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah:

- a. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Pembayaran ini termasuk dalam kaitannya dengan biaya pengembalian yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri
- b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain
- c. Pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang atau instrument ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama (selain pembayaran kas untuk instrument yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan)
- d. Penerimaan kas dari penjualan instrumen utang atau instrument ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama (selain pembayaran kas untuk instrument yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan)
- e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan)
- f. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan)
- g. Pembayaran kas untuk *future contracts*, *forwards contracts*, *option contracts* dan *swap contracts*, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki

untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan

- h. Penerimaan kas untuk *future contracts*, *forwards contracts*, *option contracts* dan *swap contracts*, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan

3. Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang berkaitan dengan perubahan dalam liabilitas jangka panjang dan ekuitas pemegang saham. Beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah:

- a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain
- b. Pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menembus saham entitas
- c. Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain
- d. Pelunasan pinjaman
- e. Pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

2.2.5.3. Pengukuran Arus Kas

Menurut Subramanyam (2017:41) menyebutkan bahwa analisis arus kas digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Analisis arus kas menjelaskan tentang pemahaman bagaimana perusahaan memperoleh pendanaan dan menggunakan sumber dayanya.

Menurut Kismawati (2019:40), menyatakan bahwa untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dapat melalui analisis rasio arus kas, sebagai berikut:

1. Rasio Arus Kas Operasi (AKO)

Rasio Arus Kas Operasi menghitung kemampuan arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar. Rasio ini diperoleh dengan membagi arus kas operasi dengan kewajiban lancar.

Rumus:

$$AKO = \frac{\text{Jumlah Arus Kas Operasi}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Rasio arus kas operasi berada dibawah 1 yang berarti terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar, tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain.

2. Rasio Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar (CKHL)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih. Rasio ini diperoleh dengan arus kas operasi ditambah dividen kas dibagi dengan hutang lancar.

Rumus:

$$CKHL = \frac{\text{Arus Kas Operasi} + \text{Deviden Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Rasio yang rendah menunjukkan kemampuan yang rendah dari arus kas operasi dalam menutup hutang lancar.

3. Rasio Pengeluaran Modal (PM)

Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada. Rasio ini diperoleh dengan arus kas operasi dibagi dengan pengeluaran modal.

Rumus:

$$PM = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Pengeluaran Modal}}$$

Rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan yang tinggi dari arus kas dalam membiayai pengeluaran modal.

4. Rasio Total Hutang (TH)

Rasio ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. Rasio ini diperoleh dari arus kas operasi dibagi dengan total hutang

Rumus:

$$TH = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Total Hutang}}$$

Rasio yang cukup rendah menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang kurang baik dalam membayar semua kewajibannya dari arus kas yang berasal dari aktivitas normal operasi perusahaan.

5. Rasio Arus Kas Bersih Bebas (AKBB)

Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kas dimasa mendatang.

Rumus:

$$AKBB = \frac{\text{Laba Bersih} + \text{Depresiasi} + \text{Sewa} + \text{Leasing} - \text{Dividen} - \text{Penge. Modal}}{\text{Bunga} + \text{Sewa} + \text{Hutang Jangka Panjang}}$$

6. Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga (CKB)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Rasio ini diperoleh dengan arus kas dari operasi tambah pembayaran bunga dan pembayaran pajak dibagi pembayaran bunga.

Rumus:

$$CKB = \frac{\text{Arus Kas Operasi} + \text{Bunga} + \text{Pajak}}{\text{Bunga}}$$

Dengan rasio yang besar menunjukkan bahwa arus kas operasi mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menutup biaya bunga sehingga kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar bunga sangat kecil.

7. Rasio Cakupan Arus Dana (CAD)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmennya (bunga, pajak, dan dividen preferen).

Rumus:

$$CAD = \frac{\text{EBIT}}{\text{Bunga} + \text{Penyesuaian Pajak} + \text{Dividen Preferen}}$$

Rasio yang besar menunjukkan bahwa kemampuan yang lebih baik dari laba sebelum pajak dalam menutup komitmen-komitmen yang jatuh tempo dalam satu tahun.

8. Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang.

Rumus:

$$KAK = \frac{\text{EBIT} - \text{Bunga} - \text{Pajak} - \text{Peng. Modal}}{\text{Rata-rata Hutang Lancar Selama Beberapa tahun}}$$

Rasio yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan yang rendah dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka beberapa tahun mendatang.

2.2.6. Inflasi

2.2.6.1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan. Syarat inflasi yaitu terjadinya kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu atau dua jenis barang saja yang naik, itu bukan merupakan inflasi (Hasyim, 2016:186).

Menurut Putong (2015:4), mendefinisikan inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan lain sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.

Selain itu, inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan sehingga terjadi penurunan daya beli oleh uang atau yang biasa disebut dengan *decrease purchasing power of money* (Tandelilim, 2010:342). Ketika tingkat inflasi sedang tinggi artinya harga barang mengalami kenaikan, hal tersebut menyebabkan permintaan masyarakat akan cenderung berkurang karena harga sedang naik. Keadaan tersebut dapat menghambat kegiatan produksi perusahaan karena penjualan akan berkurang seiring dengan menurunnya permintaan, Darmawan (2017, dalam Priyatnasari, 2019:1009).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah peningkatan harga produk baik barang atau jasa secara terus menerus yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pengadaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.

2.2.6.2. Jenis - Jenis Inflasi

Inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dalam pengelompokan tertentu, antara lain :

1. Menurut Abdullah, Thamrin (2012:61) berdasarkan tingkat keparahannya, tingkat inflasi dibedakan menjadi empat macam, yaitu:
 - a) Inflasi ringan, yaitu inflasi yang lajunya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini wajar terjadi pada Negara berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan.

- b) Inflasi sedang, yaitu inflasi yang lajunya berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Tingkat sedang ini sudah mulai membahayakan kegiatan ekonomi.
 - c) Inflasi berat, yaitu inflasi yang lajunya antara 30% sampai 100% dan kenaikan harga sudah sulit dikendalikan.
 - d) Inflasi sangat berat (Hyperinflation), yaitu inflasi yang lajunya sudah melebihi 100% per tahun dan merupakan inflasi yang paling parah.
2. Sedangkan berdasarkan penyebabnya, inflasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu:
- a) Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*), yaitu inflasi yang biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Atau inflasi ini sebagai akibat dari tarikan permintaan yang sering disebut juga dengan kelebihan permintaan. Kenaikan permintaan masyarakat akan barang konsumsi yang mendorong pemerintah dan para pengusaha untuk menambah investasi melalui kredit. Apabila permintaan tersebut terus-menerus bertambah sedangkan seluruh faktor produksi sudah digunakan secara penuh, maka hal ini akan menimbulkan kenaikan harga. Kenaikan harga yang terus-menerus ini akan menimbulkan inflasi, dan inflasi yang terlalu tinggi pada gilirannya bukan lagi menciptakan kesempatan kerja, tetapi sebaliknya akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja. Hal ini dapat dipahami jika harga-harga naik tidak diikuti oleh kenaikan upah atau gaji, seperti tenaga kerja dengan upah yang dikontrak selama beberapa tahun, sehingga menimbulkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Jika proses ini tetap terjadi dengan daya beli yang tetap rendah, maka produksi akan berhenti dan tenaga kerja akan diberhentikan dari pekerjaannya. Dengan demikian banyak tenaga kerja yang menganggur.
 - b) Inflasi desakan biaya (*Cost push inflation*), yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi. Harga-harga dan upah naik sebelum tercapainya tingkat penggunaan sumber daya secara penuh. Buruh memaksa menuntut kenaikan upah walaupun masih banyak tenaga kerja yang tidak bekerja. Hal ini dapat terjadi walaupun masih banyak tenaga kerja yang belum bekerja, apalagi jika tenaga kerja tersebut tidak memiliki

keahlian tertentu yang sesuai dengan kebutuhan akan pekerjaan. Karena itu tenaga kerja yang memiliki keahlian tinggi dibidang tertentu akan menuntut atau menawarkan tenaganya dengan harga tinggi. Upah dan biaya produksi yang tinggi akan mendorong produsen untuk menjual hasil produksinya dengan harga tinggi yang pada akhirnya mendesak harga-harga yang lain ikut berlomba naik. Perlu diingat bahwa inflasi yang disebabkan oleh biaya produksi naik ini akan diikuti oleh turunnya produksi, yang pada gilirannya akan banyak tenaga kerja yang diberhentikan atau menganggur.

2.2.6.3. Pengukuran Inflasi

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu (Utari *et al*, 2015:5), diantaranya:

1. Indeks Harga Produsen (IHP) / *Producer Price Index*

Indeks Harga Produsen atau *Producer Price Index* mengukur perubahan harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan. IHP mengukur tingkat harga yang terjadi pada tingkat produsen.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) / *Wholesale Price Index*

Indeks Harga Perdagangan Besar mengukur perubahan harga untuk transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dan pembeli / pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama. Di beberapa negara termasuk Indonesia, IHPB merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu daerah.

3. Indeks Harga Konsumen (IHK) / *Consumer Price Index*

Indeks Harga Konsumen adalah indeks yang paling banyak digunakan dalam penghitungan inflasi. Indeks ini disusun dari harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jumlah barang dan jasa yang digunakan dalam penghitungan angka indeks tersebut berbeda antarnegara dan antarwaktu, bergantung pada pola konsumsi masyarakat akan barang dan jasa tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia pada awalnya hanya digunakan sembilan bahan pokok (meliputi pangan, sandang, dan perumahan) yang

dikonsumsi masyarakat. Dalam perkembangannya, jumlah barang dan jasa tersebut berkembang menjadi semakin banyak dan tidak hanya meliputi pangan, sandang, dan papan, tetapi juga mencakup, antara lain, jasa kesehatan dan pendidikan.

4. PDB Deflator (Produk Domestik Bruto Deflator)

PDB deflator mengukur perubahan harga dalam perekonomian secara keseluruhan. Cakupan perubahan harga yang diukur dalam PDB deflator lebih luas dibandingkan dengan IHK dan IHPB. Angka deflator tersebut dihitung dengan membandingkan PDB nominal pada suatu tahun tertentu dengan PDB pada tahun tertentu yang ditetapkan. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi dan jasa.

5. Indeks Harga Aset (HA)

Perilaku pergerakan harga aset, baik aset berupa properti dan saham, dapat dijadikan indikator adanya tekanan terhadap harga secara keseluruhan. Dalam hal ini, indeks harga aset (IHA) mencerminkan potensi tekanan permintaan ke depan melalui jalur *wealth effect*

Pengukuran inflasi yang dipakai oleh peneliti adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks ini digunakan untuk melihat keberhasilan kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi, karena indikator ini dapat tersedia lebih cepat dibandingkan dengan indikator lainnya. Di Indonesia data ini dapat diperoleh dari laporan Biro Pusat Statistik, Bank Indonesia, ataupun lembaga keuangan lainnya. Formulasi pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah sebagai berikut :

$$Ll_t = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

Keterangan

Ll_t = Laju inflasi pada periode t

IHK_t = Indeks harga konsumen periode t

IHK_{t-1} = Indeks harga konsumen periode t-1

2.3. Hubungan antara Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh komite audit terhadap *financial distress*

Menurut Damayanti *et al* (2017), untuk menjadikan komite audit yang efektif dalam menjalankan tugasnya, komite audit sebaiknya memiliki jumlah anggota yang cukup yaitu minimal memiliki 3 orang anggota. Komite audit dengan jumlah anggota yang tepat dapat melindungi kepentingan pemegang saham, sehingga dapat mengendalikan dan memantau kegiatan perusahaan agar tidak menyimpang.

Penelitian yang dilakukan oleh Masak dan Noviyanti (2019) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit mampu meminimalisir terjadinya kondisi *financial distress* di perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit maka semakin tinggi pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan, sehingga pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dengan demikian kecurangan yang mungkin manajemen lakukan akan berkurang, dan hal ini juga akan meminimalisir terjadinya kondisi *financial distress*. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H1 = Komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*

2.3.2. Pengaruh rasio profitabilitas terhadap *financial distress*

Menurut Sari *et al* (2019), Anggraini *et al* (2018), dan Aisyah *et al* (2017), profitabilitas menunjukkan tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta efisiensi dan efektivitas dari penggunaan aset perusahaan. Penggunaan aset yang efektifitas akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan hal tersebut berdampak kepada penghematan dana yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Sehingga dengan meningkatnya profitabilitas, kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* menjadi kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati *et al* (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Hal ini mengindikasikan bahwa *Return On Aset* (ROA) yang tinggi akan mengurangi *financial distress* dikarenakan penjualan perusahaan mengalami peningkatan.

Nilai *Return on assets* yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan mampu menggunakan aset untuk memperoleh laba yang lebih baik. Ketika laba yang diperoleh mampu memenuhi kewajiban dan operasional perusahaan, maka perusahaan akan terhindar dari masalah *financial distress*. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H2 = Rasio Profitabilitas berpengaruh terhadap *financial distress*

2.3.3. Pengaruh rasio arus kas operasi terhadap *financial distress*

Menurut Sudaryanti dan Dinar (2019), rasio arus kas menunjukkan perbandingan jumlah aset yang digunakan dalam menghasilkan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Pada umumnya keuangan perusahaan yang sehat tercipta karena perusahaan mampu dalam mengelola kas dari operasi. Apabila perusahaan memiliki jumlah arus kas yang baik, maka kreditor akan mendapatkan keyakinan bahwa perusahaan mampu untuk melakukan kewajibannya dan perusahaan mampu terhindar dari kondisi *financial distress*

Hasil penelitian dari Mas'ud dan Srengga (2015) menyatakan bahwa arus kas operasi berpengaruh terhadap *financial distress*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki arus kas operasi yang tinggi akan menghindarkan perusahaan dari kondisi *financial distress*. Perusahaan yang memiliki arus kas operasi tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu melaksanakan aktivitas operasinya. Apabila arus kas operasi yang dihasilkannya mengalami kenaikan maka kreditor dan investor akan mendapatkan kepercayaan dan semakin kecil pula peluang perusahaan mengalami *financial distress*. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H3 = Rasio arus kas operasi berpengaruh terhadap *financial distress*

2.3.4. Pengaruh inflasi terhadap *financial distress*

Kurniasanti dan Musdholifah (2019), dan Sandi (2019) menjelaskan bahwa inflasi menyebabkan kenaikan harga komoditi di pasar, yang mengakibatkan masyarakat tidak mampu membelinya. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan sehingga dikhawatirkan perusahaan akan mengalami kerugian sehingga memicu terjadinya *financial distress*.

Hasil penelitian dari Rohiman dan Damayanti (2019) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa laju tingkat inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu operasional perusahaan dan membuat perusahaan terjebak pada kondisi *financial distress*. Peningkatan inflasi dapat mempengaruhi biaya produksi perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengalami penurunan laba yang dihasilkan. Apabila kondisi tersebut terus terjadi maka perusahaan akan mengalami kerugian yang besar dan berakibat pada kondisi *financial distress*. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H4 = Inflasi berpengaruh terhadap *financial distress*

2.3.5. Pengaruh komite audit, profitabilitas, arus kas operasi, dan inflasi terhadap *financial distress*

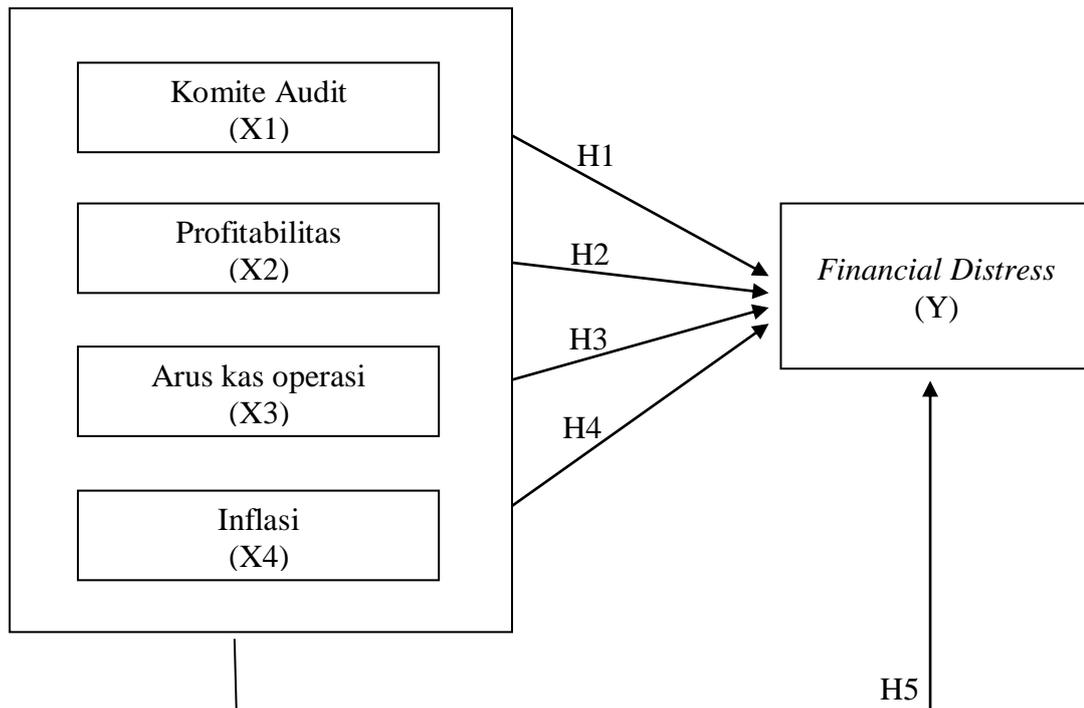
Di dalam perusahaan, komite audit mempunyai tugas untuk mengawasi kinerja pengelolaan perusahaan agar tidak adanya manipulasi yang dilakukan oleh manajemen (Susendi, 2018). Dalam menjalankan tugasnya, komite audit menganalisis laporan keuangan misalnya rasio profitabilitas dan arus kas operasi. Apabila nilai profitabilitas yang rendah dan berkelanjutan, maka akan memicu perusahaan mengalami *financial distress* (Kurniasanti dan Musdholifah, 2018). Selain itu, nilai arus kas operasi yang tinggi akan menjadikan perusahaan dapat menutupi biaya operasionalnya, sehingga peluang terjadinya *financial distress* akan berkurang (Mas'ud dan Srengga, 2015). Disisi lain, tingkat inflasi yang tinggi dan tidak terkendali akan membuat biaya operasional perusahaan tinggi. Jika hal tersebut terus terjadi maka dikhawatirkan perusahaan akan mengalami *financial distress* (Sandi, 2019). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H5 = Komite audit, profitabilitas, arus kas operasi dan inflasi berpengaruh terhadap *financial distress*

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komite audit menurut Arens (2014:104) adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen. Antara komite audit dan *financial distress* terdapat hubungan yaitu jika anggota komite audit besar maka kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* akan rendah.
2. Profitabilitas menurut Murhadi (2015:63) adalah perbandingan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Antara profitabilitas dan *financial distress* terdapat hubungan yaitu jika nilai profitabilitas rendah maka kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* akan menurun.
3. Arus kas operasi menurut Febriyan dan Prasetyo (2019:106) adalah arus kas masuk dan keluar yang berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan. Antara arus kas operasi dan *financial distress* terdapat hubungan yaitu jika nilai arus kas operasi tinggi maka kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* akan menurun.
4. Inflasi menurut Putong (2015:4) adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Antara inflasi dan *financial distress* terdapat hubungan yaitu jika inflasi tinggi maka kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* akan tinggi.
5. Komite audit, profitabilitas, arus kas operasi dan inflasi terdapat hubungan dengan *financial distress* yaitu jika nilai komite audit, profitabilitas, arus kas operasi dan inflasi tinggi atau rendah maka akan mempengaruhi kondisi *financial distress* pada perusahaan.